
KAJIAN KESENJANGAN PENDAPATAN PROVINSI JAMBI

Oleh :

PRIMA AUDIA DANIEL

Dosen STIE Muhammadiyah Jambi

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh jumlah penduduk, inflasi, investasi dan pertumbuhan ekonomi terhadap kesenjangan pendapatan di Kota Jambi selama lima tahun (2007-2011). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Gini Ratio untuk kesenjangan pendapatan dan regresi berganda Durbin Watson untuk mengetahui factor-faktor yang mempengaruhi kesenjangan pendapatan.

Hasil analisis menunjukkan bahwa seluruh variabel independen berpengaruh signifikan terhadap kesenjangan pendapatan di Jawa Tengah. Dapat disimpulkan bahwa Hipotesis Kuznets berlaku dalam penelitian ini. Hal ini dapat dilihat dari hubungan positif antara pertumbuhan ekonomi dan kesenjangan pendapatan.

Kata Kunci : Kesenjangan Pendapatan, Jumlah Penduduk, Inflasi, Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi.

LATAR BELAKANG

Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses yang menyebabkan pendapatan perkapita penduduk suatu masyarakat meningkat dalam jangka panjang. Definisi ini mengandung tiga unsur, yaitu : (1) pembangunan ekonomi sebagai suatu proses berarti perubahan yang terus menerus yang di dalamnya telah mengandung unsur-unsur kekuatan sendiri untuk investasi baru; (2) usaha meningkatkan pendapatan perkapita; (3) kenaikan pendapatan perkapita harus berlangsung dalam jangka panjang (Suryana:2009).

Di dalam pembangunan ekonomi selalu muncul polemik dalam menentukan strategi dasar pembangunannya, yaitu memprioritaskan pada pertumbuhan ekonomi atau pemerataan pendapatan. Beberapa pakar ekonomi berpendapat bahwa prioritas pada laju pertumbuhan ekonomi tinggi sudah tidak dapat lagi dipakai untuk mengurangi kemiskinan, sementara kemiskinan merupakan realita dalam kehidupan ekonomi di Negara yang sedang berkembang. Sebaliknya di Negara yang maju semangat untuk meningkatkan pendapatan

merupakan tujuan yang paling penting dari segala kegiatan ekonomi. Tingginya ekonomi suatu daerah memang tidak menjamin pemerataan pendapatan, namun pertumbuhan ekonomi yang cepat tetap dianggap merupakan strategi unggul dalam pembangunan ekonomi (Prayitno:1986).

Masalah kesenjangan pendapatan telah lama menjadi persoalan pelik dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi yang dilaksanakan oleh sejumlah Negara miskin dan berkembang. Menurut Lincoln Arsyad (1997) banyak Negara sedang berkembang yang mengalami tingkat pertumbuhan ekonomi tinggi pada tahun 1960-an mulai menyadari bahwa pertumbuhan yang semacam itu hanya sedikit manfaatnya dalam memecahkan masalah kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi tinggi gagal untuk mengurangi bahkan menghilangkan besarnya kemiskinan absolut. Dengan kata lain, pertumbuhan GNP perkapita yang cepat tidak secara otomatis meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Karena apa yang disebut dengan proses “trickle down effect” dari manfaat pertumbuhan ekonomi bagi penduduk miskin tidak terjadi seperti apa yang diharapkan.

Masalah distribusi pendapatan mengandung dua aspek. Aspek pertama adalah bagaimana menaikkan tingkat kesejahteraan mereka yang masih berada di bawah garis kemiskinan, sedangkan aspek kedua adalah pemerataan pendapatan secara menyeluruh dalam arti mempersempit perbedaan tingkat pendapatan antar penduduk atau rumah tangga. Keberhasilan mengatasi aspek yang pertama dapat dilihat dari penurunan persentase penduduk yang masih berada di bawah garis kemiskinan. Semenatara keberhasilan memperbaiki distribusi pendapatan secara menyeluruh adalah jika laju pertumbuhan pendapatan golongan miskin lebih besar dari laju pertumbuhan pendapatan golongan kaya.

Pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu proses yang melibatkan pemerintah daerah dan masyarakatnya untuk mengelola sumber daya yang ada serta membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan ekonomi dalam wilayah tersebut (Mudarajad Kuncoro : 2011). Oleh karena itu agar pembangunan ekonomi yang dijalankan dapat mengakomodasikan persoalan-persoalan yang dihadapi daerah dengan efektif dan efisien maka strategi pembangunan yang dilaksanakan harus mengacu pada karakteristik yang dimiliki daerah terutama menyangkut bagaimana mendayagunakan potensi sumber daya manusia, sumber-sumber fisik serta kelembagaan lokal baik yang formal maupun non formal.

Dengan demikian jika mencermati pengertian tersebut maka upaya mengharmonisasikan tujuan pembangunan ekonomi yang dipilih atau dijalankan. Oleh

karena itu peran pemerintah daerah melalui serangkaian intervensi kebijakan pembangunan memiliki arti strategis dalam menentukan keberhasilan tujuan pembangunan ekonomi.

Pembangunan ekonomi daerah Jambi, sebagai bagian integral dari pelaksanaan pembangunan ekonomi nasional, juga memikul tanggung jawab yang besar. Tantangan yang dewasa ini sedang dihadapi adalah bagaimana mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, yang didalamnya juga terdapat keberhasilan untuk mengurangi tingkat ketimpangan pendapatan masyarakat.

Tidak dapat dipungkiri bahwa pembangunan sektoral terutama untuk kegiatan sektor industri selalu terkonsentrasi pada daerah-daerah yang relatif lebih maju, sementara untuk daerah yang kurang berkembang tidak menjadi wilayah kegiatan industri. Perbedaan perlakuan inilah yang menyebabkan timbulnya kesenjangan pembangunan antar wilayah dimana daerah maju memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, sedangkan wilayah agraris mengalami perlambatan. Adanya perbedaan pertumbuhan inilah yang memicu adanya kesenjangan pendapatan antara masyarakat.

Dinamika perkembangan perekonomian propinsi Jambi adalah dinamika yang terdiri dari seluruh rangkaian kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh semua unsur pelaku ekonomi pada semua strata dan wilayah yang ada di propinsi Jambi. Artinya fenomena adanya keterkaitan yang positif antara tingkat pertumbuhan ekonomi dengan tingkat kesenjangan pendapatan masyarakat dalam skala yang lebih rendah dapat saja terjadi di beberapa kabupaten/kota yang ada di Jambi atau mungkin juga tidak terjadi untuk beberapa kabupaten/kota tertentu yang ada di Jambi. Penelitian ini berusaha untuk menganalisis kesenjangan pendapatan propinsi Jambi serta faktor-faktor yang mempengaruhinya selama kurun waktu 2002 – 2011.

Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan pokok yang akan dilihat dalam penelitian ini adalah :

1. Berapa besar tingkat kesenjangan pendapatan Kabupaten/Kota dalam Propinsi Jambi?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kesenjangan pendapatan Provinsi Jambi?

LANDASAN TEORI

Pembangunan ekonomi biasanya dikaitkan dengan perkembangan ekonomi di negara-negara berkembang. Sebagian ahli ekonomi mengartikan istilah ini sebagai berikut : *economic development is growth plus change*, yaitu pembangunan ekonomi adalah

pertumbuhan ekonomi yang diikuti oleh perubahan– perubahan dalam struktur dan corak kegiatan ekonomi. Dengan kata lain, dalam mengartikan istilah pembangunan ekonomi, ahli ekonomi bukan saja tertarik kepada masalah perkembangan pendapatan nasional riil, tetapi juga kepada modernisasi kegiatan ekonomi, misalnya kepada usaha merombak sektor pertanian yang tradisional, masalah mempercepat pertumbuhan ekonomi dan masalah pemerataan pendapatan (Sadono Sukirno, 1994).

Yang perlu diingat, pengertian pembangunan itu sangat luas bukan hanya sekedar bagaimana menaikkan pertumbuhan ekonomi per tahun saja. Pembangunan ekonomi itu bisa diartikan sebagai kegiatan – kegiatan yang dilakukan suatu negara untuk mengembangkan kegiatan ekonomi dan taraf hidup masyarakatnya. Dengan adanya batasan di atas, maka pembangunan ekonomi pada umumnya disefinisikan sebagai suatu proses yang menyebabkan pendapatan per kapita penduduk suatu negara meningkat dalam jangka panjang (Lincoln Arsyad, 1999).

Menurut Michael P. Todaro (1993), pembangunan di semua negara memiliki tiga sasaran yang ingin dicapai, yaitu :

1. Meningkatkan persediaan dan memperluas pembagian atau pemerataan bahan pokok yang dibutuhkan untuk bisa hidup, seperti makanan, perumahan, kesehatan dan perlindungan.
2. Meningkatkan taraf hidup, termasuk menambah dan mempertinggi penghasilan, penyediaan lapangan kerja yang memadai, pendidikan yang lebih baik dan memperhatikan nilai – nilai budaya dan kemanusiaan. Semua itu bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan materi semata, tetapi juga untuk meningkatkan kesadaran akan harga diri, baik individu maupun bangsa.
3. Memperluas jangkauan pilihan ekonomi dan sosial bagi semua individu dan nasional dengan cara membebaskan mereka dari sikap – sikap budak dan ketergantungan, tidak hanya dalam hubungannya dengan orang lain dan negara – negara lain, tetapi juga sumber – sumber kebodohan dan penderitaan manusia.

Menurut Mubyarto (1995), kesenjangan dapat dibedakan menjadi :

1. Kesenjangan antar sektor, yaitu sektor industri dan sektor pertanian. Kesenjangan jenis ini merupakan masalah lama dan sudah menjadi bahan kajian para akar di banyak negara.

-
2. Kesenjangan antar daerah. Dalam sejarah, kesenjangan antar daerah terjadi antara wilayah Jawa dan Luar Jawa, dan sejak kemajuan Provinsi Bali yang luar biasa, menjadi kesenjangan “Jawa dengan Luar Jawa Bali”.
 3. Kesenjangan antar golongan ekonomi. Kesenjangan jenis ini adalah yang paling berat dan dalam sistem perekonomian yang cenderung liberal/kapitalis, perekonomian yang tumbuh terlalu cepat justru mengakibatkan kesenjangan menjadi semakin parah.

Bigsten (1987) mengemukakan bahwa distribusi pendapatan pada sebuah perekonomian adalah hasil akhir dari seluruh proses ekonomi, yang artinya bahwa distribusi pendapatan pada prinsipnya harus memperhitungkan semua faktor yang mempengaruhinya. Adam Smith dan Marx berpendapat bahwa persoalan pokok dari distribusi pendapatan adalah bagaimana hasil penjualan produk dibagi diantaranya upah, sewa dan laba.

Lincoln Arsyad (1999) mengemukakan bahwa cara sederhana untuk mengetahui masalah distribusi pendapatan adalah dengan menggunakan kerangka kemungkinan produksi. Dalam hal ini, suatu perekonomian diasumsikan menjadi dua macam barang, yaitu barang kebutuhan pokok dan barang mewah. Menurut Irma Adelman dan Cynthia Taft Morris (Dalam Lincoln Arsyad, 2004), mengemukakan 8 sebab ketidakmerataan distribusi pendapatan, yaitu :

1. Pertambahan penduduk yang tinggi yang mengakibatkan menurunnya pendapatan per kapita.
2. Inflasi, dimana pendapatan uang bertambah tetapi tidak diikuti secara proporsional dengan pertambahan produksi barang – barang.
3. Ketidakmerataan pembangunan antar daerah.
4. Investasi yang sangat banyak pada proyek – proyek yang padat modal (*capital intensive*), sehingga persentase pendapatan modal dari harta tambahan lebih besar dibandingkan dengan persentase pendapatan yang berasal dari kerja, sehingga pengangguran bertambah.
5. Rendahnya mobilitas sosial.
6. Pelaksanaan kebijakan industri substitusi impor yang mengakibatkan kenaikan harga – harga barang industri untuk melindungi usaha – usaha golongan kapitalis.
7. Memburuknya nilai tukar (*term of trade*) bagi negara sedang berkembang dalam perdagangan dengan negara-negara maju, sehingga akibat ketidakelastisan permintaan negara-negara terhadap barang-barang ekspor NSB.

-
8. Hancurnya industri – industri kerajinan rakyat seperti pertukangan, industri rumah tangga, dan lain – lain.

Adelman dan Moris berpendapat bahwa kesenjangan pendapatan di daerah ditentukan oleh jenis pembangunan ekonomi yang ditunjukkan oleh ukuran negara, sumber daya alam, dan kebijakan yang dianut. Dengan kata lain, faktor kebijakan dan dimensi struktural perlu diperhatikan selain laju pertumbuhan ekonomi (Kuncoro, 1997).

Professor Kuznets, yang berjasa besar memelopori analisis pola-pola pertumbuhan historis di negara-negara maju, telah mengemukakan bahwa pada tahap-tahap pertumbuhan awal, distribusi pendapatan cenderung memburuk, namun pada tahap-tahap berikutnya hal itu akan membaik. Observasi inilah yang dikenal dengan hipotesis “U-Terbalik” Kuznets, sesuai dengan bentuk rangkaian perubahan kecenderungan distribusi pendapatan dengan ukuran koefisien Gini pertumbuhan GNP per kapita.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan studi yang dilakukan untuk mengkaji suatu fenomena yang didasarkan atas teori yang relevan guna mengetahui kebenaran atas teori tersebut.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diambil dari pihak lain atau merupakan data yang sudah diolah pihak kedua. Sedangkan sumber datanya berasal dari Badan Pusat Statistik, BBKPMMD Provinsi Jambi, serta instansi lain yang terkait. Selain itu data juga bersumber dari penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan dengan kajian penelitian ini.

Analisa Data

Untuk menjawab tujuan penelitian yang pertama mengenai tingkat kesenjangan pendapatan di provinsi Jambi digunakan alat analisis Indeks Gini Rasio, dengan rumus :

$$KG = 1 - \sum_{i=1}^k \frac{F_i (Y_i + Y_{i-1})}{1000}$$

Dimana :

KG = Angka Koefisien Gini

F_i = Persentase penduduk pada kelas pendapatan ke-i

Y_i = Persentase kumulatif pendapatan sampai kelas ke-i

Y_{i-1} = Persentase kumulatif pendapatan sampai kelas ke- i-1
 k = Banyaknya kelas pendapatan

Koefisien Gini ini merupakan ukuran ketidakmerataan agregat dan nilainya terletak antara 0 (kemeraan sempurna) sampai 1 (ketidakmerataan sempurna). Koefisien Gini dari negara-negara yang mengalami ketidakmerataan tinggi berkisar antara 0,50 – 0,70; ketidakmerataan sedang berkisar antara 0,36 – 0,49; ketidakmerataan rendah berkisar antara 0,20 – 0,35.

Untuk menjawab tujuan penelitian kedua mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kesenjangan pendapatan provinsi Jambi digunakan alat analisis regresi berganda Durbin Watson, yaitu :

$$GR = \beta_0 + \beta_1 Pddk + \beta_2 Inf + \beta_3 Inv + e$$

Dimana :

GR = Gini Rasio Provinsi Jambi

Pddk = Jumlah Penduduk Provinsi Jambi

Inf = Inflasi Provinsi Jambi

Inv = Investasi Provinsi Jambi

B_0 = Intercept

B_1 - β_3 = Koefisien Regresi

e = Term Error (kesalahan pengganggu)

PEMBAHASAN

Tingkat kesenjangan pendapatan penduduk Provinsi Jambi secara keseluruhan pada periode 2007 – 2011 dapat dikategorikan rendah dan berfluktuatif. Pada tahun 2007 koefisien Gini Provinsi Jambi adalah sebesar 0,358 sedangkan tahun 2008 koefisien Gini sebesar 0,280. Pada tahun 2009 turun menjadi sebesar 0,269 dan kembali meningkat pada tahun 2010 menjadi 0,304. Pada tahun 2011 meningkat lagi menjadi 0,348.

Tabel Gini Rasio Provinsi Jambi Tahun 2007 – 2011

Tahun	Gini Rasio	Perubahan
2007	0,358	-
2008	0,280	-0,218
2009	0,269	-0,039
2010	0,304	0,130
2011	0,348	0,145

Sumber : BPS Provinsi Jambi

Sementara itu untuk faktor-faktor yang mempengaruhi kesenjangan pendapatan provinsi Jambi dengan alat analisis regresi berganda Durbin Watson yang diperoleh melalui aplikasi SPSS adalah sebagai berikut :

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-16.678	9.678		-1.723	.335
Pddk	2.404	1.454	1.222	1.653	.346
Inf	.161	.124	.920	1.298	.418
Inv	.160	.091	1.428	1.770	.327

a. Dependent Variable: GR

$$GR = -16,678 + 2,404Pddk + 0,161Inf + 0,160Inv$$

Yang artinya adalah bahwa setiap terjadi kenaikan jumlah penduduk sebesar 1 persen, maka koefisien Gini provinsi Jambi akan meningkat sebesar 2,404 persen. Setiap terjadi kenaikan inflasi sebesar 1 persen maka koefisien Gini provinsi Jambi akan meningkat sebesar 0,161 persen. Sedangkan setiap terjadi kenaikan investasi (PMDN) sebesar 1 persen maka koefisien Gini provinsi Jambi juga akan meningkat sebesar 0,160 persen.

Nilai R^2 pada hasil analisis diperoleh sebesar 0,772. Hal ini mengandung arti bahwa naik turunnya kesenjangan pendapatan di provinsi Jambi mampu dijelaskan oleh variabel jumlah penduduk, inflasi dan investasi (PMDN) sebesar 77,2 persen. Sedangkan sisanya yang sebesar 22,8 persen dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Nilai koefisien korelasi (r) sebesar 0,879. Hal ini berarti bahwa besaran nilai koefisien korelasi ini tergolong tinggi, maka mengindikasikan bahwa hubungan antara jumlah penduduk, inflasi dan investasi (PMDN) dengan kesenjangan pendapatan provinsi Jambi kuat.

Untuk pengujian hipotesis secara simultan dengan tingkat signifikan sebesar 0,05 dengan hasil perhitungan signifikansi sebesar 0,584 serta nilai F_{hitung} sebesar 1,130 dan F_{tabel} sebesar 0,216. Hal ini berarti bahwa F_{hitung} lebih besar dibanding F_{tabel} maka secara bersama-sama variabel jumlah penduduk, inflasi dan investasi (PMDN) berpengaruh tapi tidak signifikan terhadap kesenjangan pendapatan di provinsi Jambi.

Pengujian hipotesis secara parsial untuk jumlah penduduk dengan tingkat signifikan sebesar 0,05 dengan hasil perhitungan signifikansi sebesar 0,346 serta t_{hitung} sebesar 1,653 dan t_{tabel} sebesar 12,706. Hal ini berarti bahwa t_{hitung} lebih kecil dibanding t_{tabel} maka secara parsial variabel jumlah penduduk tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap kesenjangan pendapatan provinsi Jambi.

Pengujian hipotesis secara parsial untuk inflasi dengan tingkat signifikan yang sama sebesar 0,05 dengan hasil perhitungan signifikan sebesar 0,418 serta t_{hitung} sebesar 1,298 dan t_{tabel} sebesar 12,706. Hal ini berarti bahwa t_{hitung} lebih kecil dibanding t_{tabel} maka secara parsial variabel inflasi tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap kesenjangan pendapatan provinsi Jambi.

Pengujian hipotesis secara parsial untuk investasi dengan tingkat signifikan yang sama sebesar 0,05 dengan hasil perhitungan signifikan sebesar 0,327 serta t_{hitung} sebesar 1,770 dan t_{tabel} sebesar 12,706. Hal ini berarti bahwa t_{hitung} lebih kecil dibanding t_{tabel} maka secara parsial variabel investasi juga tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap kesenjangan pendapatan provinsi Jambi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Tingkat kesenjangan pendapatan penduduk Provinsi Jambi secara keseluruhan pada periode 2007 – 2011 dapat dikategorikan rendah dan berfluktuatif.
2. Dari ketiga variabel bebas yang diteliti, faktor yang paling besar pengaruhnya terhadap kesenjangan pendapatan di provinsi Jambi adalah factor jumlah penduduk.



DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, Lincolin. 1997. **Ekonomi Pembangunan**. Ed. 3, Yogyakarta. Bagian penerbitan STIE YKPN
- Biro Pusat Statistik, **PDRB Jambi Menurut Lapangan Usaha**, 2011, Jambi
- Biro Pusat Statistik, **Pemerataan Pendapatan dan Pola Konsumsi Penduduk Jambi**, 2011
- Biro Pusat Statistik, **Statistik Keuangan Pemerintah Propinsi Jambi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Se Jambi**, 2011
- Boediono, 1982. **Teori Pertumbuhan Ekonomi**, Seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi, BPFE, Yogyakarta.
- Jhingan, ML. 1990. **Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan**. Jakarta : CV. Rajawali. (Terjemahan)
- Ikhsan, Moh. 1995. **Indikator-Indikator Makro Ekonomi**, Jakarta : Edisi 2 Lembaga Penerbit FE UI.

-
- Haeruman. 1996. **Pembangunan Daerah dan Peluang Pemerataan Pembangunan Antar Daerah**. Jakarta : Prisma No. Khusus 25 Tahun (1971-1996) Tahun XXV.
- Kuncoro, Mudrajad, 2011. **Otonomi dan Pembangunan Daerah**, Jakarta : Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Prayitno, Hadi dan Budi Santoso, 1996. **Ekonomika Pembangunan**, Jakarta : Gahlia Indonesia.
- Suharto. 2009. **Distribusi Pendapatan dalam Pembangunan**. Yogyakarta : Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol. 6. No.1, 2009.
- Suryana, 2009. **Ekonomika Pembangunan**, Jakarta : Penerbit Salemba Empat.
- Syafrizal. 1997. **Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Regional Wilayah Indonesia Bagian Barat**. Jakarta : Prisma Vo.3 Maret 1997.
- Tambunan, Tulus **Perekonomian Indonesia**, Jakarta : Gahlia Indonesia.
- Todaro Michael. P, 1989. **Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga**, Jakarta : PT Erlangga (Terjemahan).